



Tersedia online di

<http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/ekonika>



<http://dx.doi.org/10.30737/ekonika.v5i1.554>

EkoNika
Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri

Ketimpangan Ekonomi, Kemiskinan Dan Akses Informasi: Bagaimana Pengaruhnya Terhadap Kriminalitas Di Indonesia?

Andi Ahmad Mardinsyah¹, Ni Made Sukartini²

^{1,2}. Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

email: ¹andiahmadmardinsyah@gmail.com, ²nimade.sukartini@gmail.com

ABSTRAK

Studi ini menganalisis hubungan ketimpangan, kemiskinan dan akses informasi terhadap tindak kriminalitas di Indonesia. Data level makro 33 provinsi di Indonesia periode 2012-2017 yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dianalisis menggunakan metode regresi data panel. Didapatkan hasil bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) merupakan model terbaik. Terdapat fenomena menarik, adanya reduksi kemiskinan mengakibatkan meningkatnya kriminalitas. Tidak ditemukan cukup bukti bahwa ketimpangan dan akses informasi memengaruhi terjadinya tindak kriminal. Perlu dipertimbangkan kembali penggunaan data mikro untuk mengetahui pengaruh ketimpangan dan akses informasi terhadap kriminalitas.

Artikel History:

Artikel masuk : 29-11-2019

Artikel revisi : 07-12-2019

Artikel diterima : 29-04-2020

Keywords:

kriminalitas, ketimpangan, kemiskinan, akses informasi

ABSTRACT

This study aims to assess the linkage between inequality and information access concerning criminal acts in Indonesia. Macro-level data of 33 provinces in Indonesia during 2012-2017 from the Central Statistics Agency (BPS) were analyzed using panel data regression methods. The analysis affirms that Fixed Effect Model (FEM) is the most appropriate model in explaining criminal behavior. Interestingly, poverty reduction leads in increasing crime activity. There is not enough evidence that inequality and information access influence crime. It is necessary to reconsider the use of microdata to determine the effect of inequality and access of information on crime.

PENDAHULUAN

Salah satu standar kesuksesan pembangunan suatu negara dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ini akan berhasil mencapai tujuan kesejahteraan jika tersebar merata dan dapat dinikmati oleh masyarakat di semua kalangan. Seer dalam Todaro (2011, p. 15) menyatakan pembangunan suatu negara dapat dikatakan berhasil apabila permasalahan kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan pengangguran bisa diatasi. Namun kenyataannya, keberhasilan pembangunan belum sepenuhnya dapat dirasakan secara merata. Terjadi ketimpangan ekonomi antar kelompok masyarakat yang secara tidak langsung mengelompokkan masyarakat ke dalam kelompok masyarakat dengan pendapatan tinggi dan pendapatan rendah. Saat ini walaupun proporsi penduduk dunia yang hidup di bawah standar garis kemiskinan 2,5 dolar PPP sehari telah berkurang dari 72 persen di tahun 1990 menjadi 50 persen di 2010, namun sebagian besar masih termasuk golongan penduduk rentan kemiskinan. Terdapat 89 persen penduduk rentan kemiskinan dengan tingkat pendapatan di bawah 10 dolar PPP sehari (World Bank, 2014, p. 58). Ketimpangan antar penduduk dunia sudah semakin kecil, namun ketimpangan ekonomi antar penduduk dalam negara yang sama lebih tinggi dibandingkan 25 tahun yang lalu (World Bank, 2018). Kondisi yang sama terjadi di sebagian besar negara berkembang termasuk Indonesia.

Meningkatnya ketimpangan menyebabkan semakin tingginya kesempatan tindak kriminalitas untuk timbul (Kelly, 2000). Ketimpangan terjadi hampir di setiap aspek kehidupan. Ketimpangan pendapatan menyebabkan terjadinya keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan maupun pendidikan. Keterbatasan terhadap akses kesehatan akan memperbesar peluang kurang berkembangnya kemampuan kognitif akibat kekurangan gizi, utamanya bagi anak-anak. Keterbatasan terhadap akses pendidikan menyebabkan perbedaan kualitas pendidikan yang didapatkan. Pada akhirnya, hal ini bermuara pada semakin kecilnya peluang bagi golongan berpendapatan rendah untuk memiliki keterampilan spesifik dan memasuki pasar kerja berpenghasilan tinggi. Akibatnya, ketimpangan antara masyarakat berpendapatan tinggi dan kaum tidak mampu semakin melebar (Neckerman & Torche, 2007).

Pesatnya perkembangan teknologi dan akses terhadap informasi yang semakin mudah juga turut berperan dalam tindak kriminalitas. Adanya akses internet memengaruhi terjadinya tindak kekerasan seksual, perundungan (*bullying*), kekerasan SARA, pencurian informasi (Bhuller et al., 2013; Chan et al, 2013; Nolte, 2017; Reisig, et al., 2009; Salifu, 2008; Schechtman et al., 2006).

Tabel 1. Kondisi Sosial Ekonomi Indonesia

Indikator	2002	2005	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<i>Growth</i>								
PDB (%)	4,50	5,69	6,16	5,71	5,21	4,99	5,16	5,23
Gini Rasio	0,341	0,355	0,41	0,413	0,406	0,408	0,397	0,393
Kemiskinan (%)	18,2	15,97	11,96	11,37	11,25	11,22	10,86	10,64
Kriminalitas (kasus)	184.359	196.931	341.159	342.084	325.317	352.936	357.197	336.652
Penduduk merasa aman berjalan sendiri (%)	ta	ta	ta	Ta	73,57	ta	ta	53,32
Rumah tangga akses internet (%)	ta	ta	30,66	31,75	35,64	41,98	47,22	57,33

Keterangan

- Growth PDB 2002 dan 2005 ADHK 2000, sedangkan Growth PDB 2012-2017 ADHK 2010

- ta, data tidak tersedia

Sumber: BPS (2012b, 2013, 2014, 2015), <https://www.bps.go.id/>

Di tengah perlambatan ekonomi global, Indonesia masih mencatatkan pencapaian ekonomi yang baik. Turunnya angka pengangguran dan kemiskinan serta pertumbuhan ekonomi yang rata-rata mencapai 5 persen merupakan pencapaian yang cukup membanggakan. Namun, di samping itu terdapat fenomena yang perlu diperhatikan. Ketimpangan ekonomi yang terjadi antar golongan masyarakat menjadi semakin tinggi. Terjadi peningkatan gini rasio dari 0,341 di tahun 2002 menjadi 0,393 di tahun 2017. Semakin tingginya ketimpangan ini dibarengi angka kriminalitas yang meningkat sebesar 182 persen dibandingkan tahun 2002. Pada tahun 2002 angka kriminalitas hanya sejumlah 184.359 kasus meningkat menjadi 336.652 di tahun 2017 (lihat Tabel 1). Di masa yang akan datang Indonesia menghadapi tantangan semakin meningkatnya tingkat kriminalitas. Indonesia Police Watch (IPW) seperti dimuat dalam berita online *Republika* tanggal 8 Januari 2019 menyatakan pada tahun 2019 tingkat kejahatan di Indonesia akan semakin meningkat (Sasongko, 2019). Kejahatan yang meningkat membuat masyarakat merasa semakin tidak aman. Data BPS menyatakan terjadi penurunan persentase masyarakat yang merasa aman ketika berjalan sendirian dari 73 persen di tahun 2014 menjadi 53 persen di tahun 2017 (lihat Tabel 1). Selain berdampak terhadap turunnya produktifitas dan output perekonomian karena jaminan keamanan yang kurang dalam beraktifitas, terdapat hal

lain yang perlu diwaspadai jika ketimpangan ini semakin melebar. Salah satunya adalah kemungkinan potensi terjadi konflik kekerasan. Nurhadiantomo dalam Panggabean (2017) menyatakan konflik horizontal, kasus kekerasan dan pemerkosaan terhadap salah satu etnis minoritas pada tahun 1998 diduga dilatarbelakangi adanya ketimpangan ekonomi.

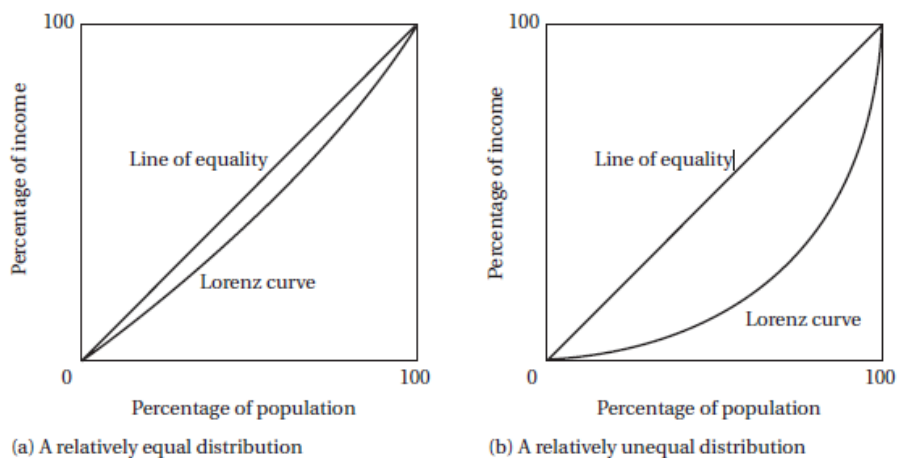
Studi mengenai hubungan antara ketimpangan dan kriminalitas sudah banyak dilakukan di Indonesia, namun sejauh pengetahuan penulis penelitian yang mengaitkan hubungan antara ketimpangan, kemiskinan, dan akses informasi terhadap kriminalitas di Indonesia masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara ketimpangan, akses informasi dan kriminalitas di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Ketimpangan Ekonomi

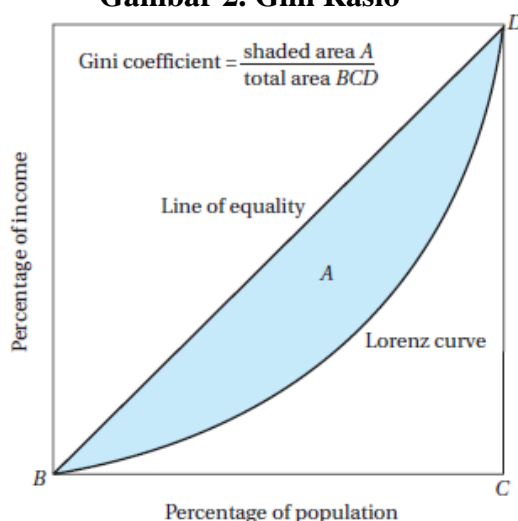
Ketimpangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan merupakan fenomena tidak meratanya distribusi pendapatan di suatu negara. Semakin besar proporsi pendapatan yang diterima masyarakat dengan kelompok pendapatan tertinggi terhadap pendapatan yang diterima masyarakat dengan kelompok pendapatan terendah berarti bahwa ketimpangan semakin besar (Todaro & Smith, 2011, p. 205).

Terdapat beberapa cara untuk melakukan pengukuran ketimpangan ekonomi, yaitu: 1) kurva Lorenz, 2) gini rasio dan 3) membagi penduduk dalam kelompok-kelompok distribusi (Todaro & Smith, 2011). Kurva Lorenz menunjukkan hubungan antara persentase penerima pendapatan dan persentase total pendapatan yang sebenarnya diterima penduduk pada periode tertentu. Sumbu horizontal menyatakan jumlah kumulatif penduduk penerima pendapatan. Sedangkan sumbu vertikal menyatakan porsi pendapatan total yang diterima oleh tiap kelompok pendapatan penduduk. Ketika kurva Lorenz semakin menjauhi garis diagonal (distribusi pendapatan merata secara sempurna), berarti ketimpangan semakin besar. Jika kurva Lorenz semakin mendekati garis diagonal berarti ketimpangan semakin kecil (Gambar 1).

Gambar 1. Kurva Lorenz

Sumber: Todaro dan Smith (2011)

Metode kedua yaitu dengan menggunakan gini rasio (Gambar 2). Pengukuran gini rasio dilakukan dengan menghitung rasio luas bidang di antara garis diagonal dan kurva Lorenz (bidang A) terhadap luas segitiga dimana kurva Lorenz itu berada (bidang BCD). Nilai koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Todaro dan Smith (2011, p. 208) mengategorikan negara dengan ketimpangan ekonomi tinggi bila memiliki angka gini rasio antara 0,50 hingga 0,70. Sedangkan negara dengan distribusi pendapatan relatif merata bila angka gini rasionya antara 0,20 hingga 0,35.

Gambar 2. Gini Rasio

Sumber: Todaro dan Smith (2011)

Metode terakhir untuk mengukur ketimpangan ekonomi yaitu dengan membagi penduduk berdasar kelompok pendapatannya. Kelompok 40 persen penduduk dengan pendapatan rendah, 40 persen penduduk dengan pendapatan menengah dan 20 persen penduduk dengan pendapatan tinggi. Ketimpangan diukur berdasarkan pendapatan yang dinikmati oleh 40 persen penduduk dengan pendapatan rendah. Klasifikasi ketimpangan menurut Bank Dunia sebagai berikut (Tambunan, 2003):

- i. Tinggi, kurang dari 12 persen total pendapatan diterima 40 persen penduduk berpendapatan rendah;
- ii. Sedang, apabila yang diterima 12 hingga 17 persen dari total pendapatan;
- iii. Rendah, apabila lebih dari 17 persen total pendapatan diterima kelompok tersebut

Dalam penelitian ini ukuran ketimpangan yang digunakan menggunakan koefisien gini rasio.

Kemiskinan

Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi dimana individu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (sandang, pangan, dan papan). Secara internasional penduduk miskin dinyatakan sebagai penduduk yang hidup di bawah standar minimum pendapatan yaitu garis kemiskinan internasional (Todaro & Smith, 2011). Pengukuran kemiskinan di Indonesia dilakukan oleh BPS dengan menggunakan konsep kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) makanan dan non makanan. BPS mendefinisikan penduduk miskin sebagai penduduk yang melakukan konsumsi per kapita dalam sebulan dengan nilai di bawah garis kemiskinan (BPS, 2018a).

Kriminalitas

Soesilo (1985) menyatakan kejahatan (kriminalitas) merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, merugikan korban maupun masyarakat dengan merusak ketentraman dan ketertiban. Sedangkan polri mendefinisikan kejahatan sebagai perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), undang-undang, dan peraturan lain yang berlaku di Indonesia (BPS, 2018b).

Ketimpangan Ekonomi dan Kriminalitas

Hubungan antara ketimpangan dengan tindak kejahatan telah menjadi perhatian penting para peneliti. Terdapat 3 teori dasar yang menjadi rujukan hubungan antara ketimpangan dengan tingkat kriminalitas, yaitu teori ekonomi kejahatan oleh Becker, teori ketegangan (*strain theory*) oleh Merton, dan teori disorganisasi sosial oleh Shaw dan McKay (Kelly, 2000). Menurut teori ekonomi kejahatan, suatu wilayah dengan tingkat ketimpangan yang tinggi, umumnya didominasi individu miskin dengan pendapatan rendah yang tinggal berdekatan

dengan individu kaya berpendapatan tinggi yang memiliki barang-barang berharga. Kondisi ini berpeluang meningkatkan alokasi waktu individu yang digunakan untuk tindak kriminalitas. Individu memertimbangkan imbal hasil antara melakukan tindakan kriminal dan usaha secara legal. Bila imbal hasil yang didapatkan dari tindakan kriminal lebih besar dari usaha secara legal individu tersebut mempunyai peluang lebih besar untuk melakukan tindakan kriminal (Becker, 1968). Teori ketegangan menyatakan individu yang mengalami ketidaksuksesan dalam hidupnya akan merasa semakin tertekan ketika dihadapkan dengan kesuksesan masyarakat di sekitarnya. Semakin tinggi ketimpangan di wilayah tersebut, semakin besar tekanan yang dialami individu dan semakin tinggi peluang individu untuk melakukan kejahatan (Merton, 1938). Teori disorganisasi sosial menyatakan kriminalitas terjadi ketika melemahnya kontrol sosial akibat kemiskinan, ketidakstabilan dalam keluarga, mobilitas penduduk dan sebagainya (Shaw & McKay, 1942).

Penelitian secara empiris terkait hubungan antara ketimpangan ekonomi dengan kriminalitas telah banyak dilakukan di dunia. Namun, kesimpulan dari studi-studi tersebut menyatakan bahwa hubungan antara ketimpangan dan tindak kriminalitas masih belum dapat dipahami dengan baik. Beberapa menyatakan terdapat korelasi positif dan signifikan antara ketimpangan dan tindak kriminalitas (Choe, 2008; Hendri, 2014; Nguyen, 2019; Pridemore, 2011; Sachsida et al., 2010; Scorzafave & Soares, 2009). Sementara penelitian lain menemukan hasil yang berbeda. Penelitian tersebut menyatakan bahwa secara statistik tidak terdapat bukti bahwa ketimpangan memengaruhi tindak kejahatan (Kelly, 2000; Mehanna, 2004; Neumayer, 2005).

Kemiskinan dan Kriminalitas

Para peneliti berpendapat bahwa individu yang berada dalam kemiskinan cenderung lebih berisiko untuk melakukan tindak kriminalitas (Pare & Felson, 2014). Sebagian mengajukan hipotesis bahwa tindak kriminalitas terjadi akibat kesempatan individu miskin tersebut untuk mendapatkan akses terhadap pencapaian tujuan-tujuan umum (harta, status/ penghargaan, dan keinginan untuk diperlakukan tanpa diskriminasi) dihalangi (Agnew, 1999; Merton, 1938). Pendapat lain menyatakan kriminalitas terjadi akibat kontrol sosial yang lemah pada masyarakat dengan ketidakberuntungan. Masyarakat miskin cenderung tinggal di lingkungan yang mengalami disorganisasi sosial. Pengaruh lingkungan tersebut akan semakin kentara ketika adanya risiko terjadi tindak kriminal membuat masyarakat berperilaku agresif dan cenderung mempersenjatai diri (Pare & Felson, 2014).

Akses Informasi dan Kriminalitas

Bhuller et al. (2013) dalam penelitiannya tentang penggunaan internet broadband di Norwegia menyatakan bahwa penggunaan internet diasosiasikan dengan peningkatan pelaporan, kasus, tuduhan, dan penetapan hukuman kejahatan seksual karena meningkatnya konsumsi konten pornografi masyarakat. Reisig et al. (2009) dalam penelitiannya di Florida tentang pengaruh perilaku online terhadap risiko pencurian informasi kartu kredit. Studi tersebut menemukan bahwa konsumen dengan status ekonomi rendah dan jarang mengakses internet memiliki resiko lebih besar untuk menjadi korban pencurian data kartu kredit. Hal ini disebabkan konsumen tersebut jarang melakukan transaksi online dan cenderung bertindak impulsif saat melakukan transaksi yang beresiko. Sementara itu, perilaku konsumen online shopping di Indonesia cenderung rasional dan umumnya memperhatikan orientasi sebelum melakukan transaksi pembelian (Khusaini et al., 2019).

METODE PENELITIAN

Data

Penelitian ini menggunakan data 33 provinsi di Indonesia kurun waktu enam tahun, yakni periode 2012-2017. Data bersumber dari publikasi Statistik Indonesia, Statistik Kriminal, dan website resmi BPS RI.

Unit analisis pada penelitian ini adalah 33 provinsi disebabkan adanya keterbatasan data. Data indikator sosial untuk Provinsi Kalimantan Utara baru tersedia pada tahun 2015. Sehingga periode 2015-2017 data Provinsi Kalimantan Utara digabung bersama Provinsi Kalimantan Timur sebagai provinsi induk dengan melakukan penghitungan ulang indikator dan penggunaan rata-rata tertimbang. Data kriminalitas tiap provinsi didapatkan dari publikasi Statistik Kriminal Indonesia. Namun data kriminalitas di Polda Sulawesi Selatan dan Papua masih merupakan gabungan data dengan provinsi pemekaran, sehingga data kriminalitas di Sulawesi Barat dan Papua Barat diambil dari publikasi Provinsi Sulawesi Barat dalam Angka dan Provinsi Papua Barat dalam Angka yang mencakup laporan kriminalitas tiap-tiap kepolisian resor (polres) di provinsi bersangkutan.

Variabel Penelitian

Dalam analisis ini variabel terikat *crime total* merupakan keseluruhan jumlah kriminalitas yang dilaporkan masyarakat ke kepolisian ataupun peristiwa dimana pelaku kriminal tertangkap tangan oleh aparat kepolisian. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini meliputi 1) ketimpangan, 2) pendapatan per kapita, 3) kemiskinan, 4) pengangguran, 5) kepadatan penduduk, 6) persentase penduduk tinggal di perkotaan, 7) rata-rata lama sekolah, dan akses

terhadap informasi dengan menggunakan variabel 8) persentase rumah tangga mengakses internet, serta 9) persentase rumah tangga menguasai telepon seluler.

Variabel ketimpangan didekati dengan menggunakan proksi ketimpangan yang didapatkan dari angka koefisien gini rasio masing-masing provinsi. Nilai koefisien gini rasio berkisar antara 0 hingga 1. Jika nilainya mendekati 1 dapat dikatakan bahwa ketimpangan ekonomi di suatu provinsi semakin besar, sedangkan jika angkanya mendekati 0 berarti pemerataan ekonomi semakin baik.

Pendapatan per kapita didekati dengan nilai PDRB per kapita masing-masing provinsi harga konstan 2010. Variabel kemiskinan didekati dengan menggunakan angka persentase penduduk per provinsi yang berada di bawah garis kemiskinan nasional. Tingkat pengangguran didekati dengan menggunakan persentase pengangguran terbuka per provinsi. Variabel kepadatan penduduk didekati dengan menggunakan rasio antara jumlah penduduk provinsi terhadap luas wilayah provinsi tersebut.

Variabel persentase penduduk tinggal di perkotaan merupakan rasio penduduk yang tinggal di perkotaan terhadap total penduduk di suatu provinsi. Variabel rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal di tiap provinsi. Variabel persentase rumah tangga mengakses internet merupakan proporsi jumlah rumah tangga yang mengakses internet terhadap total rumah tangga provinsi. Variabel persentase rumah tangga menguasai telepon seluler merupakan rasio antara jumlah rumah tangga menguasai telepon seluler terhadap total rumah tangga provinsi.

Metode Analisis

Dalam studi ini digunakan analisis regresi data panel. Analisis regresi data panel mengamati perilaku entitas yang sama secara terus menerus dalam periode tertentu (Gujarati, 2009, p. 591). Entitas tersebut bisa terdiri dari individu, perusahaan, negara dan sebagainya. Terdapat beberapa model dalam penggunaan analisis regresi data panel:

1. Model *Pooled Least Square* (PLS)

Metode OLS digunakan untuk memecahkan persamaan dalam PLS. Intersep dan slop dari metode ini bernilai konstan. Persamaan matematis model PLS sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_1 + \beta_i X_{it} + e_{it} \dots \dots \dots (1)$$

2. Model *Fixed Effect* (FEM)

Model FEM mengasumsikan tiap individu memiliki karakteristik tersendiri sehingga masing-masing memiliki intersep yang berbeda. Terdapat tiga pendekatan pada FEM, yakni FEM *Within Group*, FEM *First Difference*, dan FEM *Least Square Dummy Variabel* (LSDV). Namun model ini lebih dikenal dengan model FEM LSDV

karena dalam membedakan intersep sering menggunakan variabel *dummy*. Persamaan dalam model ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_{1i} + \beta_{2i}X_{1it} + \beta_{3i}X_{2it} + e_{it} \dots\dots\dots (2)$$

3. Model *Random Effect* (REM)

Pada pendekatan REM intersep tidak diperlakukan sebagai konstanta yang bernilai tetap namun diasumsikan sebagai variabel acak. Intersep pada model REM terdiri dari intersep bersama (β_1) yang merupakan nilai rata-rata dari semua intersep dan komponen error gabungan (w_{it}) yang merupakan simpangan acak dari intersep individual terhadap nilai rata-rata. Persamaan REM dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_1 + \beta_2X_{it} + \beta_3X_{it} + w_{it} \text{ dimana } w_{it} = e_i + u_{it} \dots\dots\dots (3)$$

Analisis data panel menggunakan beberapa uji statistik untuk memilih model terbaik diantara PLS, FEM dan REM. Baltagi dalam Gudjarati (2009, p. 592) menyatakan terdapat beberapa keuntungan yang didapatkan ketika menggunakan estimasi data panel. Diantaranya adalah lebih informatif, lebih bervariasi, kecil kemungkinan terjadinya kolinearitas antar variabel, mempunyai derajat bebas yang lebih banyak, dan lebih efisien. Penggunaan data panel juga mampu mengatasi heterogenitas yang terjadi antar subjek maupun antar waktu.

Model Penelitian

Penelitian ini bersifat kuantitatif untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan menggunakan analisis regresi panel dari 33 provinsi di Indonesia selama periode 2012-2017, sehingga didapatkan data sebanyak 198 set. Penggunaan model dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

$$ct_{it} = \beta_0 + \beta_1gini_{it} + \beta_2pdrb_{it} + \beta_3pov_{it} + \beta_4tpt_{it} + \beta_5kp_{it} + \beta_6popcity_{it} + \beta_7rtinet_{it} + rthp_{it} + \beta_9mys_{it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots (4)$$

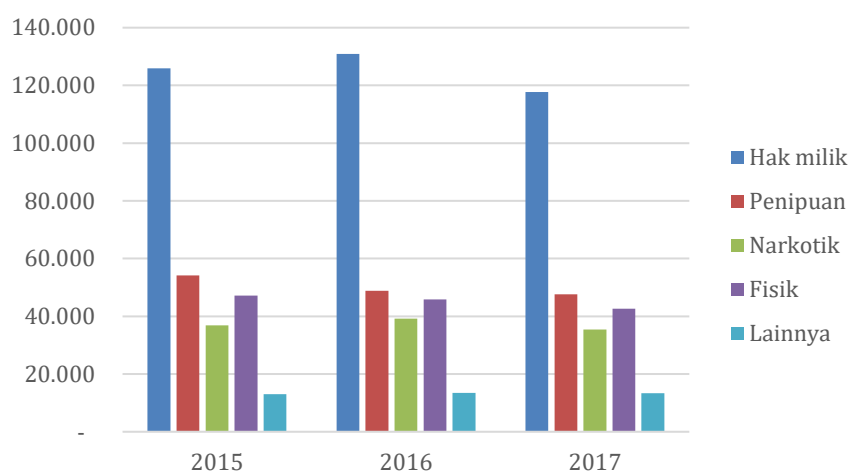
dimana

- ct_{it} : *crime total*, jumlah kejadian kejahatan provinsi;
- $gini_{it}$: nilai rasio gini provinsi;
- $pdrb_{it}$: pendapatan per kapita provinsi;
- pov_{it} : tingkat kemiskinan provinsi;
- tpt_{it} : tingkat pengangguran terbuka provinsi;
- kp_{it} : kepadatan penduduk pada provinsi;
- $popcity_{it}$: persentase penduduk provinsi yang tinggal di perkotaan;
- $rtinet_{it}$: persentase rumah tangga yang mengakses internet di provinsi;
- $rthp_{it}$: persentase rumah tangga yang menguasai telepon seluler di provinsi;
- mys_{it} : rata-rata lama sekolah provinsi;
- ε_{it} : error persamaan model provinsi;
- i : 1, . . . ,33 provinsi;
- t : 2012, . . . ,2017.

HASIL & PEMBAHASAN

Terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap angka kriminalitas di Indonesia. Walaupun pada periode 2012-2017 angkanya stabil dengan rata-rata berkisar 330 ribu kasus per tahun, namun dibandingkan tahun 2002 terjadi peningkatan hampir dua ratus persen. Hal ini patut diwaspadai mengingat rasa aman merupakan salah satu modal utama tercapainya pembangunan yang baik. Kriminalitas menyebabkan ketidakpastian dan merupakan suatu fenomena yang tidak dapat diterima dalam masyarakat yang beradab.

Gambar 3. Kriminalitas berdasarkan Jenis (kasus)



Sumber: Statistik Kriminal (2016, 2017, 2018b), BPS

BPS mengklasifikasikan kriminalitas di Indonesia ke dalam 8 kategori, yaitu 1) kejahatan terhadap hak milik, 2) penipuan, penggelapan dan korupsi, 3) kejahatan terkait narkotik, 4) kejahatan terkait nyawa, 5) kejahatan terhadap fisik, 6) kejahatan terhadap kesusilaan, 7) kejahatan terhadap kemerdekaan, dan 8) kejahatan terhadap ketertiban umum. Perbandingan masing-masing kategori kejahatan selama tahun 2015 hingga 2017 disajikan dalam Gambar 3. Terlihat bahwa tindak kriminalitas di Indonesia mengalami penurunan walaupun tidak terlalu signifikan. Kriminalitas terbanyak adalah kejahatan terhadap hak milik diikuti oleh penipuan, penggelapan dan korupsi, kejahatan terhadap fisik dan kejahatan narkotika.

Ringkasan analisis regresi data panel dapat dilihat pada Tabel 2. Dalam analisis regresi panel terdapat tiga tahapan yang harus dilalui. Tahap pertama melakukan pemilihan model antara PLS dan FEM dengan menggunakan nilai F statistik. Hipotesis nol yang digunakan adalah semua koefisien variabel dummy bernilai nol (model PLS lebih baik dalam lebih mencerminkan perilaku variabel yang diteliti). Hasil uji menyatakan bahwa dengan nilai F statistic 20,05 dan tingkat signifikansi sebesar 0,01 didapatkan hasil bahwa hipotesis nol

ditolak. Tidak semua koefisien variabel dummy bernilai nol dan model FEM lebih baik daripada PLS.

Tabel 2. Model Ketimpangan dan Kejahatan

Variabel	PLS	FEM	REM
Kemiskinan (%)	96,58 (0,65)	-1081,75** (-2,09)	-58,47 (-0,24)
Gini Rasio (0-1)	12182,18 (0,73)	28237,60 (1,54)	24715,64 (1,45)
Tingkat pengangguran (%)	588,29* (1,87)	211,12 (0,57)	312,41 (0,97)
Pendapatan per kapita (juta rupiah)	-22,10 (-0,85)	-532,36*** (-2,78)	-60,89 (-1,10)
Kepadatan penduduk (jiwa/km ²)	1,70*** (8,72)	21,00** (2,41)	1,69*** (3,73)
Penduduk tinggal di perkotaan (%)	130,55** (2,27)	1052,27** (2,22)	129,98 (1,27)
Rumah tangga pengguna internet (%)	-124,18* (-1,88)	144,22 (1,53)	-6,50 (-0,14)
Rumah tangga dg telepon seluler (%)	112,53 1,13	126,88 (0,92)	64,42 (0,55)
Rata-rata lama sekolah (tahun)	1340,53 1,48	11339,05** (-2,20)	603,71 (0,33)
C	-20949,43* (-1,88)	34533,91 (0,85)	-15321,63 (-0,91)
F, Wald, LR test (model)	20,05***	2,330**	35,520
R ²	0,490	0,874	0,460
N	198	198	198
F statistic		20,05***	
BP L-M Test		256,16***	
Hausman Test		21,5**	

Keterangan:

***, **, * tingkat signifikansi pada $\alpha = 1\%$, 5% dan 10% , nilai t-value dalam tanda kurung

Tahap kedua melakukan pemilihan model antara PLS dan REM dengan menggunakan uji Breusch Pagan Lagrange Multiplier (BP LM). Hipotesis nol yang digunakan adalah varians error antar individu dan antar waktu bernilai nol (model PLS lebih baik dari REM). Hasil uji BP LM menyatakan dengan nilai Chi square statistic 256,16 dan tingkat signifikansi sebesar 0,01 didapatkan hasil bahwa hipotesis nol ditolak. Model REM lebih baik daripada model PLS.

Tahap ketiga melakukan pemilihan model antara FEM dan REM dengan menggunakan uji Hausman. Hipotesis nol yang digunakan adalah estimator REM dan FEM tidak memiliki perbedaan yang besar. Penolakan hipotesis nol berarti bahwa estimator REM dan FEM memiliki perbedaan yang cukup signifikan sehingga lebih baik digunakan model FEM sebagai

model terpilih. Hasil uji Hausman dengan Chi square statistic sebesar 21,5 dan tingkat signifikansi 5 persen didapatkan hasil hipotesis nol ditolak. Diperoleh keputusan bahwa model FEM lebih baik daripada model REM. Nilai R^2 sebesar 0,874 menyatakan bahwa variabel-variabel bebas yang digunakan dapat menjelaskan 87,4 persen variasi dari variabel terikat kriminalitas, sedangkan 12,6 persen sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Sementara itu, dari hasil uji parsial masing-masing parameter, terdapat beberapa variabel yang signifikan memengaruhi kriminalitas, yakni kemiskinan, PDRB per kapita, kepadatan penduduk, persentase penduduk yang tinggal di perkotaan dan rata-rata lama sekolah. Sedangkan variabel bebas lain (ketimpangan, pengangguran, akses terhadap internet dan telepon seluler) tidak signifikan memengaruhi jumlah kriminalitas.

Dengan demikian model yang dihasilkan menjadi:

$$ct_{it} = 34533.91 - 1081.75Pov_{it} - 532.36PDRB_{it} + 21Kp_{it} + 1052.27PopCity_{it} - 11339.05 Mys_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dari model di atas, dapat diinterpretasikan bahwa reduksi kemiskinan sebesar 1 persen akan meningkatkan terjadinya tindak kriminalitas sebanyak 1.082 kasus. Hal ini merupakan fenomena menarik yang bertentangan dengan teori yang ada, dimana kemiskinan dan kriminalitas mempunyai hubungan positif. Allen dan Stone (1999) dalam penelitiannya di Amerika juga menemukan adanya hubungan negatif antara kemiskinan dan kriminalitas. Sebagian besar program pemerintah berbasis transfer secara langsung biasanya diberikan kepada golongan masyarakat miskin dan rentan miskin. Seperti halnya rumah tangga dengan wanita sebagai kepala rumah tangga, penyandang disabilitas, dan manula. Penduduk laki-laki muda tanpa keahlian yang berpotensi melakukan tindak kriminal tidak menjadi bagian dari sasaran program pemerintah tersebut. Adanya transfer langsung yang meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin dan rentan miskin pada akhirnya meningkatkan peluang terjadinya kejahatan.

Hal ini sesuai dengan fenomena yang terjadi di Indonesia. Pemerintah dalam melakukan pengentasan kemiskinan masih cenderung melakukan pemberian transfer. Pada tahun 2005 untuk mengurangi dampak konversi subsidi BBM pemerintah memberikan program bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat. Program tersebut berlanjut hingga saat ini walaupun pola pemberiannya telah mengalami perubahan, dari semula diberikan secara tunai kemudian ditambah pemberian bantuan secara non tunai. Di dalam salah satu press release yang dilakukan, Kepala BPS Suhariyanto menyatakan salah satu faktor penurunan angka kemiskinan disebabkan adanya peningkatan program bantuan sosial (bansos) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) (Reily, 2018).

Pendapatan per kapita mempunyai hubungan negatif terhadap tindak kriminalitas. Peningkatan pendapatan per kapita sebesar 1 juta rupiah akan menurunkan tindak kriminalitas sebanyak 532 kasus. Semakin tinggi pendapatan yang didapatkan individu, maka keinginan individu tersebut untuk melakukan tindak kejahatan akan semakin rendah. Hasil ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu. Cardena dan Rozo (2008) serta Goulas dan Zervoyianni (2013) menyatakan turunnya income per kapita akan meningkatkan risiko terjadinya tindak kriminalitas di suatu wilayah. Seringkali pendapatan per kapita yang rendah bukan disebabkan oleh banyaknya pengangguran di suatu wilayah tertentu. Namun rendahnya pendapatan yang diterima disebabkan pekerja tidak menguasai keahlian tertentu (*unskill*) dan mempunyai produktifitas yang rendah (BPS, 2012a).

Kepadatan penduduk mempunyai hubungan positif terhadap tindak kriminalitas. Peningkatan kepadatan penduduk 1 orang/ km² akan meningkatkan terjadinya tindak kriminalitas sebanyak 21 kasus. Browning et al. (2010) dalam penelitiannya juga menemukan hal yang sama. Di lokasi dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, seorang yang berpotensi melakukan tindak kriminal lebih berpeluang untuk bertemu dengan potensial korban akibat tingginya volume lalu lalang di sepanjang jalan.

Semakin banyak penduduk yang tinggal di perkotaan turut memengaruhi terjadinya tindak kriminalitas. Peningkatan penduduk yang tinggal di perkotaan sebanyak 1 persen akan menyebabkan peningkatan kriminalitas sebanyak 1052 kasus. Hal ini sejalan dengan teori disorganisasi sosial yang menyatakan hancurnya tatanan sosial masyarakat lebih banyak terjadi di daerah perkotaan. Semakin lemahnya hubungan antar personal, konsensus normatif yang disebabkan oleh ukuran, kepadatan, dan keberagaman dalam populasi di perkotaan (Shaw & McKay, 1942).

Rata-rata lama sekolah mempunyai hubungan negatif dengan kriminalitas. Bila rata-rata lama sekolah penduduk meningkat 1 tahun, angka kriminalitas akan menurun sebanyak 11.340 kasus. Hasil ini sejalan dengan penelitian Nguyen (2019) yang menyatakan bahwa penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi mengetahui cara-cara yang tepat untuk melindungi dirinya sendiri maupun menolong masyarakat di lingkungan sekitarnya untuk terhindar dari bahaya tindak kriminalitas. Dengan kata lain, individu yang tinggal di lingkungan dengan pendidikan yang tinggi mempunyai peluang yang lebih kecil menjadi korban tindak kriminal.

Di dalam penelitian ini tidak ditemukan cukup bukti bahwa ketimpangan, pengangguran dan akses terhadap informasi mempengaruhi terjadinya tindakan kriminal. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Kelly (2000) yang menemukan bahwa ketimpangan tidak berpengaruh signifikan terhadap tindak kriminalitas terhadap hak milik. Namun kriminalitas

terhadap hak milik lebih dipengaruhi oleh kemiskinan dan aktifitas aparat kepolisian. Seperti halnya penelitian Kelly (2000) tersebut, hampir 50 persen kasus tindak kriminalitas di Indonesia didominasi oleh kriminalitas terhadap hak milik (lihat Gambar 1).

Walaupun secara teori pengangguran merupakan faktor dominan yang menentukan kriminalitas, namun Masih dan Masih (1996), serta Narayan dan Smyth (2004) dalam studinya menemukan bahwa tidak cukup bukti untuk menyatakan pengangguran memengaruhi terjadinya tindak kriminalitas karena hasil uji *Granger Causality* menunjukkan hasil yang netral.

Banyak penelitian menyatakan bahwa akses terhadap informasi berpengaruh terhadap meningkatnya kasus pemerkosaan, bunuh diri, penyalahgunaan hak cipta, kekerasan agama dan etnis, perundungan (*bullying*) di media sosial dan sebagainya (Bhuller et al., 2013; Chan et al, 2013; Nolte, 2017) dimana korban jarang mempunyai keberanian, merasa takut, enggan bahkan malu untuk melaporkan sehingga data bersifat *under estimate*. Untuk mendapatkan model yang lebih valid terkait pengaruh akses informasi terhadap tindak kriminalitas kiranya diperlukan penggunaan data yang berbeda. Data yang digunakan bukan berdasarkan jumlah kasus yang dilaporkan, namun menggunakan jumlah korban tindak kriminal berdasarkan data mikro.

SIMPULAN & SARAN

Ketimpangan di antara penduduk Indonesia semakin tinggi, sementara angka kriminalitas meningkat hampir dua kali lipat dalam dua dekade terakhir. Akses masyarakat terhadap informasi melalui penggunaan internet dan telepon seluler juga turut meningkat dari tahun ke tahun. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh ketimpangan dan akses terhadap informasi terhadap terjadinya tindakan kriminal dengan menggunakan data panel periode 2012-2017. Peneliti menggunakan data total kejahatan yang dilaporkan di tiap provinsi untuk merepresentasikan tindak kriminalitas. Ditemukan fenomena menarik, reduksi kemiskinan mengakibatkan meningkatnya tingkat kriminalitas, adanya kecenderungan daerah dengan penduduk berpendidikan tinggi mengalami tindak kriminalitas yang lebih sedikit, meningkatnya pendapatan per kapita menurunkan keinginan individu untuk melakukan tindak kriminal, serta daerah perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi cenderung memiliki angka tindak kriminalitas yang tinggi pula. Sementara itu, dalam penelitian ini tidak ditemukan cukup bukti bahwa ketimpangan, pengangguran dan akses terhadap informasi memengaruhi terjadinya tindak kriminalitas.

Meningkatnya angka kriminalitas perlu menjadi perhatian pemerintah khususnya para penegak hukum. Perlu adanya penegakan hukum yang semakin tegas dan tidak pandang bulu.

Ketimpangan Ekonomi, Kemiskinan Dan....

<http://dx.doi.org/10.30737/ekonika.v5i1.554>

© 2020 *Ekonika* : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri. Semua hak cipta dilindungi undang-undang



Kerja sama di antara eksekutif, legislatif, maupun yudikatif dalam pembuatan ataupun revisi undang-undang yang lebih bisa memberikan efek jera kepada pelaku kriminal harus ditingkatkan. Adanya sistem kontrol untuk pemberian hukuman terhadap tindak kriminal sehingga dapat dilihat kewajarannya. Sanksi yang tegas kepada para hakim, jaksa dan penegak hukum yang lalai memberikan laporan harta kekayaan serta rekening yang dimiliki. Pemberian penghargaan kepada aparat penegak hukum yang berprestasi sehingga dapat menjadi teladan di instansi bersangkutan. Perlunya pembinaan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan para penegak hukum.

Bagi pengambil kebijakan fenomena reduksi angka kemiskinan yang mengakibatkan meningkatnya tindak kriminalitas perlu menjadi perhatian. Diperlukan program pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan per kapita dengan cara meningkatkan pengetahuan dan skill pekerja. Program pengentasan kemiskinan dengan menggunakan transfer langsung kepada masyarakat cenderung merupakan solusi sesaat. Ketika program tersebut dihentikan masyarakat akan jatuh miskin kembali. Selain itu, meningkatnya kesejahteraan penduduk miskin dan rentan miskin mengakibatkan penduduk muda dengan keahlian rendah yang tidak menjadi sasaran program bantuan cenderung untuk melakukan tindak kriminal karena bertambahnya potensial *victim*.

Pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan miskin dengan karakteristik penyandang disabilitas, manula dapat dilakukan dengan cara pemberian pelatihan pembuatan makanan, maupun barang-barang hasil kerajinan yang tidak memerlukan penggunaan fisik secara berlebihan. Adanya keterbatasan wanita untuk memasuki lapangan kerja karena harus mengurus rumah tangganya dapat diatasi dengan penggunaan internet untuk melakukan usaha-usaha online yang dapat dilakukan dari rumah (Aditina & Sugiharti, 2019).

Untuk penduduk muda yang tidak menjadi sasaran bantuan transfer perlu dilakukan program-program yang bersifat meningkatkan *skill* yang dimiliki. Beberapa waktu lalu, pemerintah mempunyai wacana memberikan kartu pra kerja bagi penduduk muda yang belum mempunyai pekerjaan untuk meningkatkan keahlian. Dana dari kartu pra kerja tersebut dapat digunakan untuk mengambil kursus ketrampilan sesuai minat masing-masing individu (Fauzia, 2019). Wacana itu perlu segera direalisasikan mengingat segi kemudahan implementasi di lapangan ketimbang pemerintah membuat balai latihan kerja baru untuk jenis-jenis pekerjaan yang saat ini belum ada dalam bahan ajar institusi formal pendidikan seperti pelatihan barista, operator alat berat, *coding*, bahasa asing dan sebagainya. Namun perlu diingat pemberian kartu pra kerja tersebut harus diberikan secara hati-hati berkaca pada pemberian bantuan langsung

tunai (BLT) yang lalu. Adanya kasus kesalahan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang tidak berhak menerima bantuan.

Perlu dibentuk koperasi sebagai wadah pemasaran hasil produksi. Selain itu, pemerintah dapat bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang lebih produktif. Seperti adanya pengenaan kewajiban kepada perusahaan untuk memberikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada usaha mikro kecil dengan tidak hanya sekedar memberikan bantuan materi ataupun modal, namun lebih menitikberatkan pada pelatihan kerja, pelatihan kewirausahaan, dan bantuan pemasaran produk.

Terdapat beberapa kelemahan pada penelitian ini. Pertama, data kriminalitas yang disajikan merupakan data kejahatan yang dilaporkan sehingga cenderung bersifat *under estimate* karena masih banyak korban tindak kriminal yang tidak melaporkan kasus yang dialami. Kedua, jenis kejahatan yang dipengaruhi penggunaan internet kebanyakan mempunyai motif sosial seperti pemerkosaan, bunuh diri, kekerasan agama dan etnis, perundungan (*bullying*) di media sosial. Korban yang mengalami tindak kriminal tersebut seringkali merasa takut, enggan bahkan malu untuk melakukan pelaporan. Penggunaan data total kejahatan menyebabkan pergerakan data kriminalitas Indonesia dengan motif sosial menjadi sulit diketahui. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor dominan yang memengaruhi kriminalitas dengan melakukan dekomposisi kriminalitas berdasar jenis dan motif. Selain itu, perlu dipertimbangkan penggunaan data mikro untuk melihat pengaruh ketimpangan dan akses informasi mengingat sifat data laporan jumlah kejahatan yang cenderung *under estimate*, serta penambahan variabel kontrol jumlah aparat kepolisian di masing-masing wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditina, N., & Sugiharti, L. (2019). Pengaruh Teknologi Internet Terhadap Keputusan Perempuan untuk Bekerja di Rumah. *Jurnal Economia*, 15(2), 209–220. <https://doi.org/10.21831/economia.v15i2.24694>
- Agnew, R. (1999). A General Strain Theory of Community Differences in Crime Rates. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 36(2), 123–155. <https://doi.org/10.1177/0022427899036002001>
- Allen, R. C., & Stone, J. H. (1999). Market and Public Policy Mechanisms in Poverty Reduction: The Differential Effects on Poverty Crime. *Review of Social Economy*, 57(2), 156–173. <https://doi.org/10.1080/003467699000000033>
- Becker, G. S. (1968). Crime and Punishment: an Economic Approach. In *The Economic Dimensions of Crime* (pp. 13–68). https://doi.org/10.1007/978-1-349-62853-7_2
- Bhuller, M., Havnes, T., Leuven, E., & Mogstad, M. (2013). Broadband Internet: An Information Superhighway to Sex Crime? *The Review of Economic Studies*, 80(4), 1237–1266. <https://doi.org/10.1093/restud/rdt013>
- BPS. (2012a). *Analisis Statistik Sosial: Bonus Demografi & Pertumbuhan Ekonomi*. Jakarta.

Ketimpangan Ekonomi, Kemiskinan Dan....

<http://dx.doi.org/10.30737/ekonika.v5i1.554>

- BPS. (2012b). *Statistik Kriminal 2012*. Jakarta.
- BPS. (2013). *Statistik Kriminal 2013*. Jakarta.
- BPS. (2014). *Statistik Kriminal 2014*. Jakarta.
- BPS. (2015). *Statistik Kriminal 2015*. Jakarta.
- BPS. (2016). *Statistik Kriminal 2016*. Jakarta.
- BPS. (2017). *Statistik Kriminal 2017*. Jakarta.
- BPS. (2018a). *Statistik Indonesia 2017*. Jakarta.
- BPS. (2018b). *Statistik Kriminal 2018*. Jakarta.
- Browning, C. R., Byron, R. A., Calder, C. A., Krivo, L. J., Kwan, M.-P., Lee, J.-Y., & Peterson, R. D. (2010). Commercial Density, Residential Concentration, and Crime: Land Use Patterns and Violence in Neighborhood Context. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 47(3), 329–357. <https://doi.org/10.1177/0022427810365906>
- Cárdenas, M., & Rozo, S. (2008). *Does Crime Lower Growth?* (No. 30). Retrieved from World Bank website: <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28005>
- Chan, J., Ghose, A., & Seamans, R. (2013). The Internet and Hate Crime: Offline Spillovers from Online Access. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2335637>
- Choe, J. (2008). Income inequality and crime in the United States. *Economics Letters*, 101(1), 31–33. <https://doi.org/10.1016/J.ECONLET.2008.03.025>
- Fauzia, M. (2019). Jokowi: Program Kartu Pra-Kerja Bisa untuk Kursus Coding hingga Barista. Retrieved November 25, 2019, from <https://money.kompas.com/read/2019/08/16/150313626/jokowi-program-kartu-pra-kerja-bisa-untuk-kursus-coding-hingga-barista>
- Goulas, E., & Zervoyianni, A. (2013). Economic growth and crime: does uncertainty matter? *Applied Economics Letters*, 20(5), 420–427. <https://doi.org/10.1080/13504851.2012.709596>
- Gujarati, D. N. (2009). *Basic Econometric* (Fifth Edit). New York: McGraw-Hill Education.
- Hendri, D. (2014). Kriminalitas: Sebuah Sisi Gelap dari Ketimpangan Distribusi Pendapatan. *Jurnal Ekonomi Kebijakan Publik*, 5 (2). Retrieved from http://www.academia.edu/download/38146077/Luar_Davy_Kriminalitas_22_Desember_2014-rev_2.pdf
- Kelly, M. (2000). Inequality and Crime. *Review of Economics and Statistics*, 82(4), 530–539. <https://doi.org/10.1162/003465300559028>
- Khusaini, K., Ramdani, H., & Ambarumanti, R. (2019). The Influence of Shopping and Gender Differences on Online Shopping. *Jurnal Pendidikan Ekonomi & Bisnis (Edisi Elektronik)*, 7(1), 22–30. <https://doi.org/10.21009/JPEB.007.1.3>
- Masih, A. M. M., & Masih, R. (1996). Temporal causality and the dynamics of different categories of crime and their socioeconomic determinants: evidence from Australia. *Applied Economics*, 28(9), 1093–1104. <https://doi.org/10.1080/000368496327949>
- Mehanna, R.-A. (2004). Poverty and economic development: not as direct as it may seem. *The Journal of Socio-Economics*, 33(2), 217–228. <https://doi.org/10.1016/J.SOCEC.2003.12.013>
- Merton, R. K. (1938). Social Structure and Anomie. *American Sociological Review*, 3(5), 672. <https://doi.org/10.2307/2084686>
- Narayan, P. K., & Smyth *, R. (2004). Crime rates, male youth unemployment and real income in Australia: evidence from Granger causality tests. *Applied Economics*, 36(18), 2079–2095. <https://doi.org/10.1080/0003684042000261842>
- Neckerman, K. M., & Torche, F. (2007). Inequality: Causes and Consequences. *Annual Review of Sociology*, 33(1), 335–357. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.33.040406.131755>
- Neumayer, E. (2005). Inequality and Violent Crime: Evidence from Data on Robbery and Violent Theft. *Journal of Peace Research*, 42(1), 101–112.

- <https://doi.org/10.1177/0022343305049669>
- Nguyen, H. T. M. (2019). Do more educated neighbourhoods experience less property crime? Evidence from Indonesia. *International Journal of Educational Development*, 64, 27–37. <https://doi.org/10.1016/J.IJEDUDEV.2018.12.005>
- Nolte, A. (2017). The internet effects on sex crime and murder-evidence from the broadband internet expansion in Germany. *ZEW Discussion Paper*, 17-050,. Retrieved from <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:180-madoc-436641>
- Panggabean, S. R. (2017). Conflict Studies in Indonesia: A Preliminary Survey of Indonesian Publications. *PCD Journal*, 4(1–2), 147. <https://doi.org/10.22146/pcd.25772>
- Pare, P.-P., & Felson, R. (2014). Income inequality, poverty and crime across nations. *The British Journal of Sociology*, 65(3), 434–458. <https://doi.org/10.1111/1468-4446.12083>
- Pridemore, W. A. (2011). Poverty Matters: A Reassessment of the Inequality-Homicide Relationship in Cross-National Studies. *British Journal of Criminology*, 51(5), 739–772. <https://doi.org/10.1093/bjc/azr019>
- Reily, M. (2018). BPS: Bantuan Pangan Non-Tunai Tekan Angka Kemiskinan di Bawah 10%. Retrieved November 5, 2019, from <https://katadata.co.id/berita/2018/07/16/bps-bantuan-pangan-non-tunai-tekan-angka-kemiskinan-di-bawah-10>
- Reisig, M. D., Pratt, T. C., & Holtfreter, K. (2009). Perceived Risk of Internet Theft Victimization. *Criminal Justice and Behavior*, 36(4), 369–384. <https://doi.org/10.1177/0093854808329405>
- Sachsida, A., de Mendonça, M. J. C., Loureiro, P. R. A., & Gutierrez, M. B. S. (2010). Inequality and criminality revisited: further evidence from Brazil. *Empirical Economics*, 39(1), 93–109. <https://doi.org/10.1007/s00181-009-0296-4>
- Salifu, A. (2008). The impact of internet crime on development. *Journal of Financial Crime*, 15(4), 432–443. <https://doi.org/10.1108/13590790810907254>
- Sasongko, A. (2019). Angka Kriminalitas, Naik atau Turun? Retrieved from Republika Online website: <https://market.bisnis.com/read/20191017/7/1160076/rekomendasi-saham-dan-pergerakan-ihsg-hari-ini-17-oktober-2019>
- Schechtman, G., Marett, K., & Wells, J. (2006). Internet abuse: A general theory of crime framework. *AMCIS 2006 Proceedings*, 11. Retrieved from <https://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1559&context=amcis2006>
- Scorzafave, L. G., & Soares, M. K. (2009). Income inequality and pecuniary crimes. *Economics Letters*, 104(1), 40–42. <https://doi.org/10.1016/J.ECONLET.2009.03.021>
- Shaw, C., & McKay, H. (1942). *Juvenile delinquency and urban areas*. Chicago: University of Chicago Press.
- Soesilo, R. (1985). *Kitab Undang-Undang Hukum. Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Tambunan, T. H. (2003). *Perekonomian Indonesia: Beberapa Masalah Penting*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Todaro, M., & Smith, S. C. (2011). *Economic Development* (11th ed.). Addison-Wesley, New York, NY. In *Economic Development*.
- World Bank. (2014). World Development Report - Risk and Opportunity: Managing Risk for Development. In *World Development Report*. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-9903-3>
- World Bank. (2018). *PIECING TOGETHER POVERTY P*